

# **RELASI GEREJA DENGAN NEGARA**

## **Sebuah Perspektif Teologi Kristen**

**Mingus Minarto Pranoto**

### **Pendahuluan**

Dalam diskursus teologi Kristen, pembicaraan tentang hubungan gereja dan negara bukanlah sesuatu hal yang diadakan, namun merupakan sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Hal ini karena gereja dalam penantian eskatologisnya ada di dalam dunia ini (Yoh. 17:18) atau ada di wilayah kekuasaan dari suatu pemerintahan atau teritorial suatu negara tertentu. Oleh karena itu gereja akan selalu berhubungan dengan suatu pemerintahan di wilayah kekuasaan tertentu di mana ia berada.

Abad-abad awal dalam sejarah gereja sering diwarnai ketegangan hubungan antara gereja dan negara. Penguasa-penguasa dari negara Romawi waktu itu sering melakukan tindakan penganiayaan terhadap gereja. Yesus sendiri sebagai figur sentral gereja dieksekusi oleh penguasa Romawi karena dituduh akan mendirikan suatu pemerintahan kerajaan yang baru, meskipun Yesus mengatakan secara tegas bahwa kerajaan-Nya bukan berasal dari dunia dan tidak dalam arti politik (Yoh. 18:36). Di salib di mana Yesus digantung tertulis "Raja Orang Yahudi (Mat. 27:37)," yang artinya kalau ditafsir dari perspektif penguasa Romawi, Yesus adalah seorang Zelot atau pemberontak. Sebelum kematian-Nya, Yesus pernah mengatakan bahwa "... dan karena Aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah (Mat. 10:18)." Apakah perkataan Yesus harus ditafsir bahwa gereja akan selalu dianiaya oleh negara? Tentu jawabannya tidak, karena jika

ditafsir demikian maka keberadaan gereja jelas akan dilihat sebagai musuh yang mengancam negara dan karena itu negara akan berusaha terus untuk menindas dan menghancurkan gereja. Lebih tepat jika perkataan Yesus di atas ditafsir bahwa gereja dapat dianiaya oleh negara, sebagaimana dikatakan Oscar Cullmann sebagai berikut: "This does not mean that the Church must of necessity be persecuted by the State: it does mean, however, that it must always reckon with the fact that it *can* be persecuted by the State."<sup>1</sup>

Bagaimana pandangan teologi Kristen mengenai negara? Apakah negara menjadi suatu kekuatan yang mengancam bagi gereja atau tidak? Tulisan ini akan membahas keberadaan negara dari perspektif teologi Kristen, kemudian dari pemahaman tersebut akan dipaparkan tentang bagaimana semestinya gereja berhubungan dan mempunyai sikap yang benar terhadap negara dalam konteks Indonesia.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diklarifikasi secara umum apa yang disebut gereja dan negara dalam tulisan ini. Gereja diartikan sebagai komunitas orang-orang percaya yang mengalami kelahiran baru dan menaruh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Alkitab menyebut gereja sebagai tubuh Kristus sebagai pernyataan bahwa gereja adalah milik Kristus (1Kor. 12:27; Ef. 1:23). Sebagai komunitas orang percaya, ia juga memanasifestasikan dirinya sebagai suatu realitas sosial dalam berbagai bentuk denominasi. Sedangkan pengertian negara, yang dalam bahasa Jerman "*Staat*" dan dalam bahasa Inggris "*State*," berarti dua hal, yakni: "Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis ... Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai

---

1. Oscar Cullmann, *The State in the New Testament* (New York: Charles Scribner's Sons, 1956), 7.

wilayah itu.”<sup>2</sup> Bisa disimpulkan bahwa negara berarti sebuah komunitas yang teratur yang di dalamnya ada yang memerintah (*rulers*) dan yang diperintah (*ruled*). Yang memerintah atau pemerintah (*government*) berkuasa dan kuasanya itu diakui dan wewenangnya dipatuhi oleh yang diperintah atau rakyatnya. Dalam tulisan ini istilah negara dan pemerintah, sekalipun dapat dibedakan, dipakai dalam pengertian yang kait-mengkait dan saling bergantian.

### **Pandangan Teologi Kristen tentang Negara**

Berbicara mengenai negara dalam perspektif teologi Kristen selalu dikaitkan dengan suatu bentuk pemerintahan di dunia yang memiliki kuasa (atau kuasa-kuasa: *exousiae*).<sup>3</sup> Kuasa apapun, dalam pandangan iman Alkitab, termasuk kuasa yang dimiliki oleh pemerintahan duniawi adalah berasal dari Allah, yang adalah Pencipta dan Penguasa atas bangsa-bangsa serta Tuhan atas sejarah dunia. Dengan demikian suatu negara atau pemerintah terbentuk,

---

2. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 170.

3. Studi mengenai “kuasa-kuasa” di dalam alam pemikiran PB (bahasa Yunannya: *exousiae*, bentuk jamak) menunjuk tidak saja pada kuasa yang diberikan kepada negara (sebagaimana di dalam Rm. 13), namun juga menunjuk pada kuasa yang diberikan kepada malaikat-malaikat (lih. Ef. 6:10-12; bnd. Why. 13). Teologi liberal menolak jika arti kuasa-kuasa dihubungkan kepada malaikat-malaikat. Brownlee mengatakan bahwa kuasa-kuasa di PB menunjuk pada tiga pengertian: pertama, berbicara mengenai kuasa-kuasa metafisik, kuasa-kuasa setan, malaikat-malaikat dan kuasa-kuasa rohani; kedua, yaitu berbicara mengenai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan sistem-sistem kuasa di dunia ini; dan ketiga, mengacu pada kuasa alamiah seperti maut dan hidup. Menurutnya yang pertama tampak kuat di dalam alam pikir Yahudi dan Yunani. (Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan: Dasar Teologis Bagi Pekerjaan Kristen dalam Masyarakat* [Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993], 48.).

pertama-tama, oleh karena ada kuasa yang diberikan dari atas, sebagaimana dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Pilatus, “Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas” (Yoh. 19:11). Negara ada tidak semata-mata karena keinginan manusia tetapi karena Allah menghendaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus: “... sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah” (Rm. 13:1). Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa setiap bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini selalu sesuai dengan kehendak Allah. Yang ditekankan di sini adalah kuasa yang dimiliki oleh setiap bentuk apapun pemerintahan yang ada di dunia ini semuanya berasal atau bersumber dari Allah. Brownlee mengatakan secara tepat:

Walaupun adanya lembaga-lembaga itu sesuai dengan rencana Allah, bentuk dan pekerjaan setiap lembaga menjadi tanggung jawab manusia. Allah tidak memberikan kepada kita aturan masyarakat yang sudah jadi. Ia memberikan tugas mengatur. Dalam mengerjakan tugas itu, manusia wajib mengubah lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah memanggil kita untuk menciptakan struktur-struktur masyarakat yang lebih adil. Namun kita jangan lupa bahwa tugas kita adalah tugas mengatur, yaitu membentuk suatu masyarakat yang teratur.<sup>4</sup>

Negara adalah bentuk perkembangan tertinggi dari pembentukan sebuah komunitas. Komunitas yang lebih sederhana adalah seperti keluarga dan masyarakat. Negara atau pemerintah yang merupakan suatu komunitas yang terbentuk di wilayah tertentu sebenarnya menyatakan keinginan Allah agar manusia hidup tidak di dalam kesendirian tetapi tinggal di dalam komunitas

---

4. Brownlee, *Tugas Manusia*, 43.

dengan manusia lainnya.<sup>5</sup> Dari terang pengertian ini, sebenarnya sifat dasar (*nature*) negara mengikuti desain atau aturan kehendak Allah di dalam aturan-aturan penciptaan (*orders of creation*), yaitu bahwa Allah menginginkan manusia untuk hidup bersama dalam komunitas. Allah juga menghendaki agar manusia menjalani kehidupan dengan baik di dalam komunitas yang teratur di mana ia tinggal. Oleh karena itu negara mempunyai peranan yang sangat vital untuk mewujudkan kehidupan komunitas yang baik.

Negara dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia bersama di suatu tempat agar tercipta keteraturan dan kestabilan. Mengatur jumlah orang banyak tidak mudah, perlu adanya suatu lembaga yang memiliki kuasa yang besar seperti negara untuk mengaturnya. Misalnya dalam kehidupan bersama perlu ada pengaturan soal pembangunan instalasi dan penyaluran listrik, lalu lintas jalan raya, sistem pendistribusian air, fasilitas pendidikan, dsb. Dalam hal ini negara mempunyai fungsi positif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Negara juga dibutuhkan agar manusia yang telah jatuh di dalam dosa tidak semakin menjadi kacau dan anarki oleh karena tidak ada yang mengontrolnya lagi. Negara menjadi hamba Allah yang menyangandang kuasa pedang (Rm. 13:4; bnd. 1Ptr. 2:14). Tujuan Allah menciptakan lembaga negara, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus, adalah bahwa negara atau pemerintah mempunyai kuasa untuk memberikan hukuman kepada orang-orang jahat (Rm. 13:2,4). Terhadap warga negaranya yang melakukan perbuatan baik, negara memberi perlindungan dan upah atau pujian (Rm.

---

5. Dari sumbangan teologi biblika, dikatakan bahwa sebagaimana Allah tidak pernah tinggal sendirian sejak kekekalan karena Ia ada dalam persekutuan dalam Keluarga Trinitas, Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus, demikian pula manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya (Kej. 1:26), mengikuti kehendak-Nya untuk tinggal bersekutu dengan yang lain dalam sebuah komunitas.

13:3). Oleh karena itu tidak ada alasan untuk takut kepada negara atau pemerintah jika orang-orang yang tinggal di dalam suatu negara tidak melakukan kejahatan apapun. Tetapi orang-orang jahat haruslah takut terhadap negara karena negara mempunyai kuasa untuk bertindak keras atau menggunakan paksaan fisik apabila orang-orang tidak mengikuti hukum dan peraturan yang ditetapkannya.

Perlu diperhatikan bahwa pandangan ideal Rasul Paulus tentang negara tidak menjadikan gereja harus berkesimpulan bahwa negara, sebagai hamba Allah yang menyandang pedang, tidak dapat salah dalam kebijakannya, tindakannya, hukum, dan peraturan yang dimiliki serta dilakukannya. Sikap yang menganggap negara tidak dapat salah adalah interpretasi yang keliru dalam pemahaman teologi Kristen tentang negara. Sebagaimana dikatakan oleh Liem Khiem Yang, "Sudah terlalu sering terjadi bahwa mereka mendekati Rm. 13:2-7 sebagai ajaran Kristen tentang pemerintahan duniawi, menarik kesimpulan bahwa oleh karena itu jemaat Kristen harus selalu tunduk kepada segala pemerintahan duniawi yang ditetapkan oleh Allah."<sup>6</sup> Jika pendekatan ini diikuti oleh gereja maka akibatnya gereja akan menyatakan ketaatan yang buta dan tidak kritis.

Yesus Kristus mengkritik penguasa pada zaman-Nya oleh karena sikap otoriter yang dimilikinya dan Ia tidak ragu-ragu menyebut penguasa waktu itu sebagai "serigala" (Luk. 13:32; bnd. hal yang sama dilakukan Yohanes Pembaptis: Mrk. 6:14-29 atau Mat. 14:1-12). Dalam gaya bahasa ironi, Yesus juga mengecam para penguasa yang meskipun memerintah dengan otoriter dan menindas orang-orang, namun tetap menyebut diri mereka sendiri

---

6. Liem Khiem Yang, *Menghayati Kalam Dalam Hening: Kumpulan Karangan Terpilih Liem Khiem Yang*, ed. Martin L. Sinaga (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2007), 119.

sebagai pelindung-pelindung (Luk. 22:25).<sup>7</sup> Sekalipun negara pada waktu itu merupakan sebuah institusi yang harus dihormati, sebagaimana dibuktikan dengan perkataan-Nya yang terkenal “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Mrk. 12:17),” namun Yesus tidak menempatkan pemerintah sebagai sesuatu yang tidak bisa salah. Dengan kata lain, institusi tersebut mempunyai keterbatasannya. Jika negara menggunakan kuasa yang dimilikinya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana digambarkan oleh Roma 13, maka negara menjadi hamba Allah. Sebaliknya jika negara keluar dari batas-batas itu maka negara menjadi hamba setan. Contoh yang jelas tentang hal ini digambarkan di dalam Why. 13. Negara dalam kitab ini digambarkan dalam bahasa mitologi<sup>8</sup> yang merefleksikan suatu keadaan partikular waktu itu namun bisa juga menjadi gambaran umum tentang adanya tirani. Tirani ini disimbolkan dengan binatang yang keluar dari dasar laut dan menjadi hamba dari binatang naga serta memperoleh juga kuasa darinya (Why. 12:1-9). Binatang ini menghujat nama Allah, berperang melawan orang-orang kudus, mempunyai kuasa atas tiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan menuntut orang-orang untuk menyembahnya (Why. 13:7-8). Apa yang dilakukan oleh negara yang digambarkan dalam Why. 13

---

7. Cullmann, *The State*, 19.

8. Bahasa mitologi di dalam Kitab Wahyu tidak boleh dipahami sebagai bahasa yang tidak sangkut menyangkut mengenai realitas waktu itu. Bahasa itu membahasakan sesuatu yang riil dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Perlu untuk diperhatikan apa yang dikatakan oleh Nicholas Beryaef, di dalam tulisannya berjudul *The Meaning of History*, diterjemahkan George Reavey (London: Bles, 1949), 21, bahwa “Myth is no fiction, but a reality; it is, however, one of a different order from that of the so-called objective empirical fact. Myth is the story preserved in popular memory of past event . . . transcends the limits of the external objective world, revealing a subject-object world of facts.”

ini jelas mengambil hak Tuhan Allah, yaitu dalam soal ibadah dan penyembahan. Negara dalam gambaran ini, menurut Thielicke, “. . . the state throws off its provisional character, its commission, its relativity, and proclaims itself to be definitive, absolute, lord by its own grace.”<sup>9</sup> Negara yang seperti ini menjadi negara yang tidak hanya mengancam gereja secara khusus, tetapi juga secara umum warga negara yang tinggal di dalamnya.

### **Gereja Berelasi dengan Negara**

Sikap yang dominan dari gereja atau jemaat mula-mula di masa PB dalam relasinya terhadap negara atau pemerintah pada waktu itu adalah penerimaan (*acceptance*) dan ketaatan (*obedience*).<sup>10</sup> Gereja mempunyai sikap ini karena percaya bahwa negara ada di dalam dunia untuk melakukan tugas pemeliharaan ilahi. Sikap gereja ini direpresentasikan secara utama dalam pandangan teologi Rasul Paulus (Rm. 13:1-7) dan Rasul Petrus (1Ptr. 2:13-14). Dua pandangan teologi ini terlihat sangat jelas dan fokus dalam mengatur sikap gereja dalam relasinya dengan negara di PB. Alasan-alasan untuk mengambil sikap penerimaan dan ketaatan sedikitnya didasari oleh dua hal. Pertama, karena gereja pada waktu itu ada dalam posisi minoritas dan kebanyakan dari kelompok masyarakat kelas bawah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa; kedua, karena gereja mengira bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi dalam waktu yang dekat.<sup>11</sup> Gereja berharap bahwa zaman waktu itu segera berlalu dan Kerajaan Allah datang segera. Konsekuensi dari sikap tersebut adalah bahwa gereja pada waktu itu cenderung untuk tidak mempunyai sikap lain selain

---

9. Helmut Thielicke, *Theological Ethics*, Volume 2: Politics (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1979), 54.

10. E. Clinton Gardner, *Biblical Faith and Social Ethics* (New York: Harper and Row), 312.

11. Ibid.



ketaatan kepada negara. Jika negara tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai hamba Allah dan malahan bertindak sewenang-wenang maka gereja pada waktu itu percaya bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan datang segera mengakhiri zaman waktu itu melalui merealisasikan Kerajaan-Nya.<sup>12</sup> Konsekuensi dari sikap ini adalah bahwa gereja cenderung untuk tidak mempunyai pandangan terhadap isu-isu politik saat itu; dan hal ini berakibat tidak adanya usaha untuk memberi pengaruh terhadap para penguasa yang ada dalam tugas-tugas pemerintahan mereka.<sup>13</sup> Sikap penerimaan dan ketaatan menjadikan gereja mempunyai sikap untuk tunduk kepada negara sekalipun gereja mengalami penganiayaan yang teramat berat. Penganiayaan akan berakhir dengan sendirinya dan gereja dianjurkan untuk tetap berbuat baik supaya melalui perbuatan-perbuatan baik mereka dapat membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh (1Ptr. 2:15).

Apakah sikap penerimaan dan ketaatan cukup memadai untuk diteruskan dalam kehidupan gereja zaman sekarang ini? Tentu sikap penerimaan dan ketaatan terhadap hukum-hukum dan kebijakan yang baik dari negara adalah sesuatu yang tidak salah. Namun sikap penerimaan dan ketaatan tidak menjadikan bahwa kemudian gereja harus menjadi pasif serta tunduk tanpa memberikan suara kenabiannya sama sekali jika ada sesuatu yang keliru pada negara. Sikap yang pasif serta tunduk tanpa memberikan suara kenabian tentu tidak tepat. Sebagaimana pernah terjadi di Jerman, ketika Hitler berkuasa, banyak gereja yang mempunyai

---

12. Gardner, *Biblical Faith*, 312.

13. Ibid. Perlu dicatat bahwa beberapa figur dari gereja mula-mula memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para penguasa waktu itu, misalnya Rasul Paulus di Kis. 16:35-40, 25:1-26:32; dan Lukas di Kis. 1:1. Pertemuan mereka dalam kaitannya dengan tugas pekabaran Injil dan tidak ada kaitan dengan isu-isu politik dan usaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang ada.

sikap menerima dan menaati rencana-rencana politik Hitler yang jelas-jelas berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sikap penerimaan dan ketaatan yang tidak kritis dari banyak gereja di Jerman waktu itu sebenarnya menunjukkan bahwa gereja-gereja tersebut mendukung otoritas pemerintahan Hitler yang kejam.<sup>14</sup>

Dalam kehidupan berbangsa seperti di sebuah negara demokrasi Indonesia ini, sikap penerimaan dan ketaatan sebagaimana telah mendominasi sikap gereja di Perjanjian Baru oleh karena pengaruh teologi Paulus dan Petrus perlu dimaknai dengan baru atau ditaruh dalam konsep yang baru. Atau dapat dikatakan bahwa, "In view of the rise and growth of democracy in many countries, the Pauline-Petrine doctrine of obedience to the governing authorities needs to be converted into new concepts which are more relevant to the existing relationship between the state and the people."<sup>15</sup> Sikap penerimaan dan ketaatan yang cenderung menempatkan gereja dalam posisi yang tidak kritis dalam relasinya dengan negara, semestinya diganti dengan sikap yang partisipatif dan bertanggung jawab,<sup>16</sup> sehingga gereja dapat menjalankan perannya dalam memberikan suara kenabian. Dengan demikian gereja menjadi aktif dan kreatif untuk menjadi garam dan terang bagi pemerintahan di mana ia berada. Sikap penerimaan dan ketaatan yang tidak kritis menjadikan kehidupan gereja akan fokus saja pada kegiatan internal yang dibatasi oleh dinding-dinding gereja saja, dengan asumsi pemikiran bahwa gereja hanya tunduk dan percaya saja bahwa negara sebagai hamba Allah.

Jika gereja mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh kosmos maka tanda-tanda Kerajaan Surga

---

14. Bnd. A. Sumarwan, "Kejahatan Atas Nama Negara," *Majalah Basis*, Maret-April 2007, 33.

15. Gardner, *Biblical Faith*, 314.

16. Bnd. John C. Bennett, *The Christian As Citizen* (New York: Association Press, 1995), 51.

seperti keadilan, kebenaran, dan kasih harus dinyatakan tidak saja dalam lingkungan tembok gereja, tetapi juga harus dinyatakan di semua elemen kehidupan yang ada. Maggay mengatakan, "The ecclesia visibilis is not just the church at worship but the church in the market place, the church in the academe or the church in politics."<sup>17</sup> Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja menjadi teladan utama bagi gereja dalam melakukan panggilannya dalam berelasi dengan negara. Bagaimana sikap Yesus?

Jesus, like the prophets before him, points men to God who is the Lord of heaven and earth, and he teaches them to pray that His will may be done "on earth as it is in heaven." He reveals the power and goodness and the love of God, and he teaches men to love God with heart, mind, soul, and strength and to love their neighbors as themselves. Behind the teaching and the actions of Jesus in relation to the political authorities and the political factions of his day is his faith in the living God, whom he meets even here as Creator, as Governor, and as Redeemer. This is the God whom he trusts as his Heavenly Father and whose will he undertakes to do in every situation.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

Gereja dalam relasinya dengan negara harus menyadari bahwa negara bisa menjadi instrumen Allah (Rm. 13:1-6) atau sebaliknya sebagai instrumen setan (Why. 13:1-10). Tugas menyatakan suara kenabian adalah wujud nyata kehadiran gereja secara partisipatif dan bertanggung jawab terhadap suatu negara atau pemerintah di mana gereja berada. Partisipasi dan tanggung jawab gereja dalam negara adalah suatu keharusan, terutama dalam sikap yang menyatakan peran profetis di dalam konteks Indonesia. Selain itu, gereja juga wajib mendukung program-

---

17. Melba Padilla Maggay, *Transforming Society* (Quezon City: the Institute for Studies in Asian Church and Culture, 1996), 14.

18. Gardner, *Biblical Faith*, 314.

program pemerintah yang mendatangkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negaranya.